

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memasuki tahun kelima dalam rentang waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 guna mewujudkan visi dan misi yang telah disiapkan dalam masa pembangunan lima tahun.

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap kepala satuan perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana kerja satuan perangkat daerah yang sesuai dengan tupoksi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman pada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Rencana Strategi Sekretariat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat setiap tahun anggaran diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang yang berlaku.

Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengingat bahwa :

- a. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA-OPD hasil evaluasi

- pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- b. Rencana Renja OPD memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat.
  - c. Rancangan Renja OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antara pemangku kepentingan dalam rangka menentukan prioritas sub kegiatan yang mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah.
  - d. Rancangan Renja OPD akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD, karena Musrenbang RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan antar rancangan RENJA-OPD dan antar RKPD Kabupaten/Kota.
  - e. Rancangan Renja OPD walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RKPD namun tetap bahwa RENJA-OPD sebagai bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Selain itu RENJA-OPD juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA - OPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan. Kejelasan dan logisnya kegiatan yang sesuai dengan TUPOKSI disertai alokasi biayanya yang tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, harus tertuang dalam RENJA-OPD, karena RENJA-OPD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4422);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- h. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Setda Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Renstra Setda Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 kedalam rencana program, kegiatan Sub Kegiatan dan penganggaran sesuai kondisi dan kebutuhan. Lebih jauh lagi penyusunan renja sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) pada setiap tahun anggaran yang akan dilaksanakan, serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 adalah :

- a. Menyediakan acuan /pedoman resmi dalam menyusun dan mensinkronkan seluruh rencana pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana strategi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Menyediakan tolok ukur penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
- c. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Memberikan pedoman Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat diukur dan dievaluasi secara obyektif.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 adalah Sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan (2) Dasar Hukum (3) Maksud dan Tujuan (4) Sistematika Penulisan

#### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, memuat uraian kinerja pelayanan OPD, permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Review terhadap rancangan awal RKPD, memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan usulan para pemangku kepentingan.

#### **BAB III Tujuan dan Sasaran**

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja OPD yang memuat perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

#### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan**

Bab ini menguraikan tentang Program kegiatan dan sub kegiatan memuat penjelasan mengenai faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai

rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan, tabel rencana program kegiatan dan sub kegiatan (perumusan program kegiatan dan sub kegiatan).

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2020**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020**

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten yaitu 1) Asisten Bidang Pemerintahan yang membawahi Biro Tata Pemerintahan dan Biro Hukum; 2) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dan Biro Kesejahteraan Rakyat; dan 3) Asisten Bidang Administrasi Umum membawahi Biro Organisasi dan Tatalaksana dan Biro Umum Perlengkapan dan Protokol.

Ringkasan jumlah anggaran belanja di sekretariat daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
 Belanja Daerah di Sekretariat Daerah  
 Triwulan IV Tahun Anggaran 2020

No	Biro	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
1	Biro Tata Pemerintahan	17.546.300.000	17.349.738.494	196.561.506	98,88
2	Biro Hukum	1.834.402.640	1.781.321.523	53.081.117	97,11
3	Biro Perekonomian dan Adm. Pembangunan	2.992.923.430	2.952.169.373	38.910.885	98,31
4	Biro Kesejahteraan Rakyat	3.826.641.920	3.748.852.036	77.789.884	97,96
5	Biro Organisasi dan Tatalaksana	1.839.999.870	1.774.795.202	65.204.668	96,46
6	Biro Umum Perlengkapan dan Protokol	81.734.495.507	79.200.735.332	79.200.735.332	96,90



Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 berjumlah 8 Program dan 29 Kegiatan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan IV tahun anggaran 2020 masing – masing biro dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Tabel Rencana dan Realisasi Input (Anggaran) Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Kegiatan			Ket. Biro
		Rencana	Realisasi	%	
<b>I.</b>	<b>Biro Tata Pemerintahan</b>	<b>17.546.300.000</b>	<b>17.349.738.494</b>	<b>98,88</b>	<b>Biro Tapem</b>
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.217.093.645</b>	<b>1.203.811.244</b>	<b>98,91</b>	<b>Biro Tapem</b>
1.1	Penyediaan alat tulis kantor	89.999.020	86.698.120	96,33	Biro Tapem
1.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.839.900	44.509.200	97,10	Biro Tapem
1.3	Penyediaan makanan dan minuman	147.750.000	140.774.000	95,28	Biro Tapem
1.4	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	235.196.000	235.022.932	99,93	Biro Tapem
1.5	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke	504.444.625	504.302.892	99,97	Biro Tapem

	Dalam Daerah				
1.6	Penyusunan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan	193.864.100	192.504.100	99,30	Biro Tapem
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>120.621.600</b>	<b>92.139.250</b>	<b>76,39</b>	<b>Biro Tapem</b>
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	87.931.600	62.099.250	70,62	Biro Tapem
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32.690.000	30.040.000	91,89	Biro Tapem
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>31.623.600</b>	<b>31.623.600</b>	<b>100</b>	<b>Biro Tapem</b>
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	31.623.600	31.623.600	100	Biro Tapem
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>	<b>51.130.500</b>	<b>48.727.200</b>	<b>95,30</b>	<b>Biro Tapem</b>

	<b>Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.169.000	36.765.700	93,86	Biro Tapem
4.2	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	4.310.800	4.310.800	100	Biro Tapem
4.3	Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD	7.650.700	7.650.700	100	Biro Tapem
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>98.352.435</b>	<b>98.346.435</b>	<b>99,99</b>	<b>Biro Tapem</b>
5.1	Pelaksanaan Kerjasama Daerah	89.166.435	89.160.435	99,99	Biro Tapem
5.2	Inventarisasi Kerjasama antar Daerah dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	9.186.000	9.186.000	100	Biro Tapem
<b>6.</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>33.265.900</b>	<b>33.265.900</b>	<b>100</b>	<b>Biro Tapem</b>

6.1	Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru	33.265.900	33.265.900	100	Biro Tapem
<b>7.</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>15.488.390.840</b>	<b>15.337.458.065</b>	<b>99,03</b>	<b>Biro Tapem</b>
7.1	Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan	24.675.000	24.544.300	99,47	Biro Tapem
7.2	Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	23.547.000	23.279.000	98,86	Biro Tapem
7.3	Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan	24.160.140	23.964.140	99,19	Biro Tapem
7.4	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan	15.232.830.000	15.193.904.000	99,74	Biro Tapem
7.5	Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	49.517.000	47.580.400	96,09	Biro Tapem
7.6	Persertifikatan Tanah	133.661.700	24186225	18,10	Biro Tapem

<b>8.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah</b>	<b>180.889.720</b>	<b>179.955.500</b>	<b>99,48</b>	<b>Biro Tapem</b>
8.1	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	180.889.720	179.955.500	99,48	Biro Tapem
<b>9.</b>	<b>Program Fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>280.281.360</b>	<b>279.761.000</b>	<b>99,81</b>	<b>Biro Tapem</b>
9.1	Rapat Kordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak	263.856.460	263.336.100	99,80	Biro Tapem
9.2	Administrasi Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pada	16.424.900	16.424.900	100	Biro Tapem

	hasil pilkada				
<b>10.</b>	<b>Program peresmian, pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota</b>	<b>14.475.000</b>	<b>14.474.900</b>	<b>100</b>	<b>Biro Tapem</b>
10.1	Pengelolaan Administrasi PAW DPRD Provinsi dan Kabupaten	14.475.000	14.474.900	100	Biro Tapem
<b>11.</b>	<b>Program Pembinaan Wilayah</b>	<b>2.237.000</b>	<b>2.237.000</b>	<b>100</b>	<b>Biro Tapem</b>
11.1	Rapat Koordinasi Bidang Bina Adminsitration Kewilayahan	2.237.000	2.237.000	100	Biro Tapem
<b>12.</b>	<b>Program Layanan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi</b>	<b>27.938.400</b>	<b>27.938.400</b>	<b>100</b>	<b>Biro Tapem</b>
12.1	Rapat Koordinasi Penataan Batas Wilayah	16.559.400	16.559.400	100	Biro Tapem

12.2	Inventarisasi Rupabumi Unsur Buatan di Provinsi Sulawesi Barat	16.559.400	16.559.400.	100	Biro Tapem
	<b>Biro Hukum</b>	<b>1.834.402.640</b>	<b>1781.321.523</b>	<b>97,11</b>	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>924.079.880</b>	<b>901.372.083</b>	<b>97,54</b>	Biro Hukum
1.1	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	240.780.000	240.130.423	99,73	Biro Hukum
1.2	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	241.358.640	240.482.810	99,64	Biro Hukum
1.3	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Pegawai	441.941.240	420.758.850	95,21	Biro Hukum
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>78.135.000</b>	<b>70.406.820</b>	<b>90,11</b>	Biro Hukum
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala	78.135.000	70.406.820	90,11	Biro Hukum

	kendaraan dinas/operasional				
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>41.810.600</b>	<b>34.155.900</b>	<b>81,69</b>	Biro Hukum
3.1	Pembuatan Laporan Penatausahaan Keuangan dan Asset	41.810.600	34.155.900	81,69	Biro Hukum
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>409.723.300</b>	<b>403.189.500</b>	<b>98,41</b>	Biro Hukum
4.1	Koordinasi rencana aksi nasional Hak asasi manusia	64.968.800	63.987.800	98,49	Biro Hukum
4.2	Penanganan Penyelesaian Perkara Litigasi	285.181.500	282.029.750	98,89	Biro Hukum
4.3	Penanganan Perkara pada Kasus Non	59.573.000	57.171.950	95,97	Biro Hukum



	Litigasi				
5	<b>Program Penataan Perundang-undangan</b>	<b>257.835.940</b>	<b>252.110.220</b>	<b>97,78</b>	Biro Hukum
5.1	Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat	75.404.900	72.143.650	95,68	Biro Hukum
5.2	Program Pembentukan Peraturan Daerah	23.452.060	23.424.300	99,88	Biro Hukum
5.3	Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya	83.818.560	82.347.770	98,25	Biro Hukum
5.4	Harmonisasi dan pembahasan peraturan Gubernur	75.160.420	74.194.500	98,71	Biro Hukum
6	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>122.817.920</b>	<b>120.087.000</b>	<b>97,78</b>	Biro Hukum
6.1	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov.	57.034.820	55.945.750	98,09	Biro Hukum

	Sulawesi Barat				
6.2	Pengundangan dan autentifikasi Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat	65.783.100	64.141.250	97,50	Biro Hukum
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>456.036.101</b>	<b>450.534.621</b>		<b>Biro Ekban g</b>
1.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9.000.000	8.071.400	89,68	Biro Ekbang
1.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.371.800	38.347.000	99,94	Biro Ekbang
1.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.156.275	15.109.900	99,69	Biro Ekbang
1.4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.390.000	16.948.000	97,46	Biro Ekbang
1.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	58.958.000	58.881.000	99,87	Biro Ekbang
1.6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar	175.909.600	172.746.571	98.20	Biro Ekbang

	Daerah				
1.7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	96.250.426	96.237.000	99,99	Biro Ekbang
1.8	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai	45.000.000	44.193.75	98,21	Biro Ekbang
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>88.273.100</b>	<b>88.152603</b>		<b>Biro Ekbang</b>
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.858.000	9.858.000	100	Biro Ekbang
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	71.870.000	71.764.503	99,85	Biro Ekbang
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.545.100	6.530.100	99,77	Biro Ekbang
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	-	-		<b>Biro Ekbang</b>

3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	-	-	Biro Ekbang
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>		<b>Biro Ekbang</b>
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	8.000.000	8.000.000		Biro Ekbang
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>127.245.500</b>	<b>124.731.600</b>		<b>Biro Ekbang</b>
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	81.072.600	80.891.950	99,78	Biro Ekbang
5.2	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD	46.172.900	43.839.650	94,95	Biro Ekbang
5.3	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	-	-	-	Biro Ekbang
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan</b>	<b>139.813.900</b>	<b>132.290.150</b>		<b>Biro Ekban</b>

	<b>Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah</b>				<b>g</b>
6.1	Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran (TEPRA) Se- Sulbar	65.775.720	58.784.200	89,37	Biro Ekbang
6.2	Pengembangan Sistem e-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	54.858.200	54.326.950	99,03	Biro Ekbang
6.3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	19.179.980	19.179.000	99,99	Biro Ekbang
<b>7</b>	<b>Program Penguatan Ekonomi Daerah</b>	<b>323.639.304</b>	<b>313.366.401</b>		<b>Biro Ekbang</b>
7.1	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Prov. Sulbar	82.989.000	82.716.000	99,67	Biro Ekbang
7.2	Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan BUMD	73.163.504	70.994.351	97,04	Biro Ekbang
7.3	Penyediaan Administrasi Tim Pengendali Inflasi	69.670.400	63.034.400	90,48	Biro Ekbang

	Prov. Sulbar				
7.4	Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (High Level Meeting)	28.507.400	28.507.400	100	Biro Ekbang
7.5	Penyedia Administrasi TPAKD Prov. Sulbar	69.309.000	68.114.250	98,28	Biro Ekbang
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>1.849.915.525</b>	<b>1.835.093.998</b>		<b>Biro Ekbang</b>
8.1	Koordinasi Dalam Pendampingan dan Perlindungan Hukum Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	201.379.800	198.061.500		Biro Ekbang
8.2	Penataan Administrasi Layanan Pengadaan	447.448.000	437.846.368	97,85	Biro Ekbang
8.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1.050.643.925	1.049.791.430	99,92	Biro Ekbang

8.4	Penyusunan Katalog Elektronik Lokal	74.564.000	73.514.900	98,59	Biro Ekbang
8.5	Workshop Penyusunan dan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	75.879.800	75.879.800	100	Biro Ekbang
<b>II.</b>	<b>Biro Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>3.826.641.920</b>	<b>3.748.852.036</b>	<b>97,96</b>	<b>Biro Kesra</b>
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>843.520.680</b>	<b>843.334.949</b>	<b>99,98</b>	<b>Biro Kesra</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	444.550.000	444.550.000	100	Biro Kesra
1.2	Penyediaan Alat Tulis kantor	64.848.780	64.848.780	100	Biro Kesra
1.3	Penyediaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	100	Biro Kesra
1.4	Penyediaan makan dan minum	39.744.000	39.743.000	100	Biro Kesra
1.5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	154.098.800	154.096.826	100	Biro Kesra
1.6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	135.279.100	135.096.343	99,86	Biro

	dalam daerah				Kesra
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>87.390.000</b>	<b>85.452.595</b>	<b>97,78</b>	<b>Biro Kesra</b>
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opesional	87.390.000	85.452.595	97,78	Biro Kesra
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>80,00</b>	<b>Biro Kesra</b>
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	5.000.000	4.000.000	80,00	Biro Kesra
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>20.534.400</b>	<b>20.534.400</b>	<b>80,00</b>	<b>Biro Kesra</b>
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.600.000	1.600.000	100	Biro Kesra
4.2	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	1.600.000	1.600.000	100	Biro Kesra
4.3	Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP	3.532.800	3.532.800	100	Biro



	dan LPPD				Kesra
4.4	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	6.900.800	6.900.800	100	Biro Kesra
4.5	Penyusunan RKAP/DPPA SKPD	6.900.800	6.900.800	100	Biro Kesra
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan</b>	<b>167.284.520</b>	<b>167.017.900</b>	<b>99,84</b>	<b>Biro Kesra</b>
5.1	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Hibah/bansos Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan	167.284.520	167.017.900	99,84	Biro Kesra
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama</b>	<b>2.702.912.320</b>	<b>2.628.512.192</b>	<b>97,25</b>	<b>Biro Kesra</b>
6.1	Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi	1.020.270.920	1.020.001.400	99,97	Biro Kesra
6.2	Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Nasional	1.626.529.400	1.552.464.792	95,45	Biro Kesra

6.3	Verifikasi Hbah Bansos Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan lainnya	56.112.000	56.046.000	99,88	Biro Kesra
	<b>BIRO ORTALA</b>	<b>1.839.999.870</b>	<b>1.774.795.202</b>	<b>96,46</b>	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>467.636.450</b>	<b>455.193.697</b>		<b>Biro Ortala</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	105.000.000	93.750.000	89,29	Biro Ortala
1.2	Penyediaan alat tulis kantor	31.938.300	31.789.000	99,53	Biro Ortala
1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	29.989.350	29.900.000	99,70	Biro Ortala
1.4	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.630.600	3.617.600	99,64	Biro Ortala
1.5	Penyediaan makanan dan minuman	37.770.000	37.770.000	100	Biro Ortala
1.6	Rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	155.828.000	155.682.917	99,91	Biro Ortala
1.7	Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	103.480.200	102.684.180	99,23	Biro Ortala

<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>69.491.700</b>	<b>64.406.952</b>		<b>Biro Ortala</b>
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	69.491.700	64.406.952	92,68	Biro Ortala
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>146.400.000</b>	<b>146.400.000</b>		<b>Biro Ortala</b>
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	146.400.000	146.400.000	100	Biro Ortala
<b>4</b>	<b>Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>42.772.670</b>	<b>36.652.400</b>		<b>Biro Ortala</b>
4.1	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan SP4N (Sistem Pengelolaan	13.807.170	9.223.900	66,81	Biro Ortala

	Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Pemprov. Sulbar				
4.2	Supervisi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat	28.969.500	27.428.500	94,68	Biro Ortala
<b>5</b>	<b>Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>230.801.800</b>	<b>203.690.350</b>		<b>Biro Ortala</b>
5.1	Workshop dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	110.199.200	86.315.900	78,33	Biro Ortala
5.2	Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	120.602.600	117.374.450	97,32	Biro Ortala
<b>6</b>	<b>Program Penataan Tata Laksana</b>	<b>277.398.570</b>	<b>270.435.443</b>		<b>Biro Ortala</b>
6.1	Evaluasi penerapan SOP Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah	106.772.820	104.953.100	98,30	Biro Ortala

	Provinsi Sulawesi Barat				
6.2	Penyusunan Road Map RB 2020 2025 Provinsi Sulawesi Barat	128.674.900	127.778.143	99,30	Biro Ortala
6.3	Evaluasi Pelaksanaan RB Provinsi Sulawesi Barat	24.367.250	20.120.600	82,57	Biro Ortala
6.4	Evaluasi Peta Proses Bisnis Lingkup Pemprov. Sulbar	17,583.600	17.583.600	100	Biro Ortala
<b>7</b>	<b>Program Manajemen Sumber Daya Manusia</b>	<b>274.560.830</b>	<b>274.359.980</b>		<b>Biro Ortala</b>
7.1	Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Se Sulawesi Barat	70.093.950	69.928.600	99,76	Biro Ortala
7.2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan perangkat daerah se Prov Sulawesi Barat	56.310.500	56.275.000	99,94	Biro Ortala
7.3	Penataan Administrasi KGB,KP, dan Pensiun Lingkup Setda Prov.	148.156.380	148.156.380	100	Biro Ortala

	Sulbar				
<b>8</b>	<b>Program Penguatan Organisasi</b>	<b>330.933.850</b>	<b>323.656.380</b>		<b>Biro Ortala</b>
8.1	Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	94.287.722	94.135.252	99,84	Biro Ortala
8.2	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	75.000.000	67.875.000	90,50	Biro Ortala
8.3	Sosialisasi perundang undangan tentang organisasi perangkat daerah	33.239.318	33.239.318	100	Biro Ortala
8.4	Pendampingan tentang Tata Cara Penyusunan Budaya Kerja Perangkat Daerah	128.406.810	128.406.810	100	Biro Ortala
	<b>BIRO UMUM</b>	<b>81.734.495.507</b>	<b>79.200.735.332</b>	<b>96,90</b>	<b>Biro Umum</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>38.902.142.057</b>	<b>37.256.350.172</b>	<b>95,77</b>	<b>Biro Umum</b>

1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	303.109.720	299.945.840	98,96	Biro Umum
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.078.757.880	2.002.936.092	96,35	Biro Umum
1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	617.304.500	596.158.110	96,57	Biro Umum
1.4	Penyediaan makanan dan minuman	11.346.287.887	11.345.935.600	100	Biro Umum
1.5	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.359.800.160	1.359.708.007	99,99	Biro Umum
1.6	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	421.290.600	421.117.200	99,96	Biro Umum
1.7	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	26.404.900	26.404.900	100	Biro Umum
1.8	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai	340.483.700	325.265.400	95,53	Biro Umum
1.9	Pengelolaan Administrasi Tata	1.326.324.020	1.081.638.475	81,55	Biro

	Usaha Sekretariat Daerah				Umum
1.10	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Gubernur	2.221.498.240	2.121.783.981	95,51	Biro Umum
1.11	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Wakil Gubernur	1.004.981.900	712.047.428	70,85	Biro Umum
1.12	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Asisten Sekretaris Daerah	1.512.293.400	1.124.258.685	74,34	Biro Umum
1.13	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Para Staf Ahli Gubernur	1.618.024.720	1.332.597.014	82,36	Biro Umum
1.14	Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan	8.680.596.860	8.651.523.670	99,67	Biro Umum
1.15	Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat	5.951.044.410	5.762.021.670	96,82	Biro Umum
1.16	Penataan Kearsipan Lingkup Biro Umum dan Perlengkapan	93.939.160	93.008.100	99,01	Biro Umum
<b>2</b>	<b>Program</b>	<b>30.687.443.320</b>	<b>29.921.127.018</b>	<b>97,50</b>	<b>Biro</b>



	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>Umum</b>
2.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.217.081.000	6.091.570.000	97,98	Biro Umum
2.2	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1.102.185.144	1.041.940.130	99,91	Biro Umum
2.3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.049.071.000	1.041.940.130	99,32	Biro Umum
2.4	Pengadaan peralatan gedung kantor	1.891.452.500	1.878.949.600	99,34	Biro Umum
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	2.132.364.500	2.132.285.500	100	Biro Umum
2.6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.590.024.000	6.539.794.980	99,24	Biro Umum
2.7	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1.577.070.000	1.379.419.308	87,47	Biro Umum
2.8	Pemeliharaan rutin/berkala	3.534.210.000	3.200.541.561	90,56	Biro Umum

	kendaraan dinas/operasional				
2.9	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.197.849.856	1.180.413.733	98,54	Biro Umum
2.10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	970.880.820	960.794.142	98,96	Biro Umum
2.11	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung VIP Room Bandara	1.035.254.500	1.024.800.714	98,99	Biro Umum
2.12	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	1.295.000.000	1.294.461.500	99,96	Biro Umum
2.13	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	2.095.000.000	2.094.969.500	100	Biro Umum
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>238.581.000</b>	<b>238.570.866</b>	<b>100</b>	<b>Biro Umum</b>
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	238.581.000	238.570.866	100	Biro Umum

<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>2.911.568.010</b>	<b>2.870.159.218</b>	<b>98,58</b>	<b>Biro Umum</b>
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	148.690.320	148.644.220	99,97	Biro Umum
4.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	22.264.360	22.234.360	99,87	Biro Umum
4.3	Penyusunan laporan keuangan triwulanan	50.312.600	50.312.600	100	Biro Umum
4.4	Pengelolaan Gudang dan Pendistribusian Barang	268.523.500	267.463.210	99,61	Biro Umum
4.5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program	312.480.280	302.920.050	96,94	Biro Umum
4.6	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa Lingkup Biro Umum dan Perlengkapan	387.565.640	386.848.477	99,81	Biro Umum

4.7	Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara Sekretariat	216.051.800	215.320.650	99,66	Biro Umum
4.8	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	289.075.920	289.075.920	100	Biro Umum
4.9	Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara KDH dan WKDH	41.388.200	41.388.200	100	Biro Umum
4.10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	89.241.200	89.241.200	100	Biro Umum
4.11	Monitoring Penggunaan Barang dan Pemanfaatan Barang	372.337.380	352.790.100	94,75	Biro Umum
4.12	Penyusunan HPS dan Pengadministrasian Dokumen Proses Pengadaan	404.490.390	396.421.451	98,01	Biro Umum
4.13	Penatausahaan PPK SKPD	154.116.520	153.896.920	99,86	Biro Umum
4.14	Konsolidasi Sekretariat Daerah Pemerintah	63.654.600	63.649.800	99,99	Biro

	Provinsi Sulawesi Barat				Umum
4.15	Elektronisasi Pencatatan dan Pendataan Barang	91.375.300	89.952.060	98,44	Biro Umum
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>8.994.761.120</b>	<b>8.914.528.058</b>	<b>99.11</b>	<b>Biro Umum</b>
5.1	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	3.986.813.500	3.986.685.660	100	Biro Umum
5.2	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	2.754.829.960	2.754.472.020	99,99	Biro Umum
5.3	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	913.077.080	859.154.158	94,09	Biro Umum
5.4	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	381.451.680	361.284.660	94,71	Biro Umum

5.5	Pelayanan Kedinasan Protokoler	958.588.900	952.931.560	99,41	Biro Umum
-----	--------------------------------	-------------	-------------	-------	-----------

## 2.2. Rencana dan Realisasi Output (Keluaran) Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur			Ket
		Output (keluaran)	Rencana %	Realisasi	
<b>I.</b>	<b>Biro Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase Outcome dan Output</b>	<b>100</b>	<b>96,85</b>	<b>Biro Tapem</b>
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>98,74</b>	<b>Biro Tapem</b>
1.1	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang dibeli	40	40	Biro Tapem
1.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia	39.827	38,703	Biro Tapem
1.3	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dos makanan yang dibeli	1.636	1,558	Biro Tapem
1.4	Rapat-Rapat	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang diikuti	13	13	Biro Tapem

	Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				
1.5	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumah perjalanan dinas dalam daerah yang diikuti	54	54	Biro Tapem
1.6	Penyusunan Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Ketatausahaan	Jumlah dokumen perencanaan dan ketatausahaan yang tersusun	3	3	Biro Tapem
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	<b>40,00</b>	<b>Biro Tapem</b>
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	10	2	Biro Tapem
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Jumlah service peralatan gedung kantor	4	4	Biro Tapem

	kantor				
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Biro Tapem</b>
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	6	6	Biro Tapem
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Biro Tapem</b>
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	3	100	Biro Tapem
4.2	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA/DPA SKPD yang tersusun	2	100	Biro Tapem
4.3	Penyusunan RKA-	Jumlah Dokumen RKA-P/DPPA SDKP	2	100	Biro Tapem



	P/DPPA-SKPD				
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya kerjasama daerah untuk meningkatkan produktifitas pemerintah provinsi sulawesi barat</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Biro Tapem</b>
5.1	Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah laporan kerjasama daerah yang terlaksana	1	1	Biro Tapem
<b>5.</b>	<b>Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Persentase pelayanan urusan pertanahan</b>	<b>100</b>	<b>50,00</b>	<b>Biro Tapem</b>
5.1	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah luas tanah yang dibebaskan	15	15	Biro Tapem
5.2	Persertifikatan Tanah	Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan	1	0	Biro Tapem
<b>6.</b>	<b>Program</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Biro Tapem</b>

	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah</b>	<b>pembangunan daerah</b>			
6.1	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	80	100	Biro Tapem
<b>7.</b>	<b>Program Fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>Biro Tapem</b>
7.1	Rapat Kordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pilkada serentak	4	4	Biro Tapem

	Biro Hukum				
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100,00</b>	<b>296,07</b>	
1.1	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	100,00	190,00	
1.2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	100,00	373,33	
1.3	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Pegawai	Pelayanan Administrasi perkantoran	100,00	100,00	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100,00</b>	<b>2300,00</b>	

	<b>Aparatur</b>				
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara	100,00	2300,00	
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100,00</b>	<b>81,69</b>	
3.1	Pembuatan Laporan Penatausahaan Keuangan dan Asset	Dokumen laporan Penatausahaan yang dihasilkan	100,00	81,69	
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan</b>	<b>Jumlah penanganan perkara litigasi, non litigasi dan HAM</b>	<b>100</b>	<b>114,28</b>	

	<b>Kebijakan KDH</b>				
4.1	Koordinasi rencana aksi nasional Hak asasi manusia	Jumlah kabupaten yang ikut serta dalam rencana aksi HAM	100	100,00	
4.2	Penanganan Penyelesaian Perkara Litigasi	Jumlah kasus yang disidangkan	100	200,00	
4.3	Penanganan Perkara pada Kasus Non Litigasi	Jumlah kasus yang ditangani	100	100,00	
<b>5</b>	<b>Program Penataan Perundang-undangan</b>	<b>Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>100</b>	<b>138,13</b>	
5.1	Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten se-Sulawesi Barat	Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Se-Sulawesi Barat yang dievaluasi dan diklarifikasi	100	590,00	
5.2	Program Pembentukan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-	100	150,00	

	Peraturan Daerah	undangan			
5.3	Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya	Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya yang tersusun	100	104,42	
5.4	Harmonisasi dan pembahasan peraturan Gubernur	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan	100	124,44	
<b>6</b>	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Jumlah jejaring pemberi layanan dan akses terhadap produk hukum daerah</b>	<b>100</b>	<b>106,47</b>	
6.1	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov. Sulawesi Barat	Akses Publik atas Informasi Produk Hukum	100	106,47	
6.2	Pengundangan dan autentifikasi	Jumlah Pengundangan dan autentifikasi Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat	100	106,47	

	Produk Hukum Provinsi Sulawesi Barat				
3	Biro Ekbang				
3.1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	15	15	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang terpenuhi	50	50	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	43	43	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga yang terpenuhi	12	12	
	Penyediaan	Jumlah makanan dan Minuman	432	432	

	Makanan dan Minuman	Yang tersedia			
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Hasil Laporan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	24	24	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Hasil Laporan Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	14	14	
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai	Jumlah tenaga yang menangani pengelolaan administrasi	30	30	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	2	2	
	Pemeliharaan	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua dalam	24	24	



	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kondisi layak pakai			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	15	15	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kepatuhan Aparatur</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pegawai yang terpenuhi	45	-	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Sumber Daya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan dan pelatihan formal	8	8	
	<b>Program Peningkatan</b>	<b>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

	<b>Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan dan ikhtisar yang tersedia	24	24	
	Penyusunan Renstra/Renja/LA KIP dan LPPD	Jumlah dokumen yang disusun	4	4	
	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
	Rapat Koordinasi Penyerapan Anggaran (TEPRA)		17	17	

	Se- Sulbar				
	Pengembangan Sistem e-Monitoring dan Evaluasi Pembangunan		17	17	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah		5	5	
	<b>Program Penguatan Ekonomi Daerah</b>	<b>Persentase Bahan Kebijakan dan Pembinaan terkait Pertumbuhan ekonomi dan Tingkat Inflasi Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Prov. Sulbar	Jumlah Dokumen standarisasi harga satuan barang prov.sulbar yang di susun	1	1	
	Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan BUMD	Tingkat Pengawasan dan Pembinaan BUMD	80	80	
	Penyediaan Administrasi Tim	Jumlah dokumen yang terpenuhi	4	4	

	Pengendali Inflasi Prov. Sulbar				
	Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (High Level Meeting)	Jumlah Laporan yang terpenuhi	2	2	
	Penyedia Administrasi TPAKD Prov. Sulbar	Jumlah dokumen yang terpenuhi	1	1	
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>Peningkatan perangkat daerah yang telah menggunakan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Prosedur</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Koordinasi Dalam Pendampingan dan Perlindungan Hukum Proses Pelaksanaan Pengadaan	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	4	4	

	Barang/Jasa				
	Penataan Administrasi Layanan Pengadaan	Jumlah Dokumen yang Terpenuhi	1	1	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12	12	
	Penyusunan Katalog Elektronik Lokal	Jumlah dokumen katalog Elektronik Lokal	10	10	
	Workshop Penyusunan dan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Peserta yang terpenuhi	80	80	
<b>4</b>	<b>Biro Kesra</b>	<b>Persentase Outcome dan Output</b>	<b>100</b>	<b>99,26</b>	<b>Biro Kesra</b>
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>99,80</b>	<b>Biro Kesra</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Biaya Honorarium Pegawai Tidak tetap dan	4,000	4,000	Biro Kesra

		materai			
1.2	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	40	40	Biro Kesra
1.3	Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	38,562	38,562	Biro Kesra
1.4	Penyediaan makan dan minum	Jumlah makan dan minum yang disediakan	12	12	Biro Kesra
1.5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan luar daerah yang dilaksanakan	12	12	Biro Kesra
1.6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	15	15	Biro Kesra
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100</b>	<b>66,70</b>	<b>Biro Kesra</b>
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda dua dan roda empat terpelihara	3	2	Biro Kesra
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Biro Kesra</b>
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang terlatih	1	1	Biro Kesra
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Biro Kesra</b>

	<b>Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	3	3	Biro Kesra
4.2	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan	2	2	Biro Kesra
4.3	Penyusunan Renstra/Renja/LA KIP dan LPPD	Jumlah dokumen	4	4	Biro Kesra
4.4	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah dokumen	2	2	Biro Kesra
4.5	Penyusunan RKAP/DPPA SKPD	Jumlah dokumen	2	2	Biro Kesra
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan</b>	-	<b>100</b>	<b>75,90</b>	<b>Biro Kesra</b>
5.1	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Hibah/bansos Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan	Jumlah Hibah Bansos Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan	527	400	Biro Kesra
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan</b>	-	<b>100</b>	<b>88,61</b>	<b>Biro Kesra</b>

	<b>Pembinaan Kerukunan Beragama</b>				
6.1	Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi	Jumlah peserta lomba MTQ/STQ tingkat Provinsi	138	100	Biro Kesra
6.2	Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Nasional	Jumlah peserta lomba STQ/MTQ Tingkat Nasional	76	-	Biro Kesra
6.3	Verifikasi Hibah Bansos Rumah Ibadah dan Kegiatan Keagamaan lainnya	Jumlah laporan verifikasi hibah bansos rumah ibadah dan kegiatan	787	787	Biro Kesra
<b>5</b>	<b>Biro Ortala</b>				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	100	100	Biro Ortala
1.2	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dibeli	100	100	Biro Ortala
1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah nilai barang cetakan yang disediakan	100	100	Biro Ortala
1.4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah nilai peralatan rumah tangga yang disediakan	100	100	Biro Ortala
1.5	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah dos makanan yang dibeli	100	100	Biro Ortala



1.6	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang diikuti	100	100	Biro Ortala
1.7	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang diikuti	100	100	Biro Ortala
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	100	100	Biro Ortala
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja; Jumlah honor yang dibayarkan	100	100	Biro Ortala
4	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat				
4.1	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan SP4N (Sistem Pengelolaan	Jumlah Peserta	100	100	Biro Ortala

	Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Pemprov. Sulbar				
4.2	Supervisi dan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Se Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah unit layanan yang disupervisi	100	100	Biro Ortala
5	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
5.1	Workshop dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	Jumlah Peserta	100	100	Biro Ortala
5.2	Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Lakip	100	100	Biro Ortala
6	Program Penataan Tata Laksana				
6.1	Evaluasi penerapan SOP Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Perangkat Daerah	100	100	Biro Ortala
6.2	Penyusunan Road Map RB 2020	Jumlah Dokumen Roadmap	100	100	Biro Ortala

	2025 Provinsi Sulawesi Barat				
6.3	Evaluasi Pelaksanaan RB Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Perangkat Daerah	100	100	Biro Ortala
6.4	Evaluasi Peta Proses Bisnis Lingkup Pemprov. Sulbar	Jumlah Dokumen	100	100	Biro Ortala
7	Program Manajemen Sumber Daya Manusia				
7.1	Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah Se Sulawesi Barat	Jumlah OPD yang di evaluasi	100	100	Biro Ortala
7.2	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan perangkat daerah se Prov Sulawesi Barat	Jumlah Dokumen Standar kompetensi Jabatan	100	100	Biro Ortala
7.3	Penataan Administrasi KGB, KP, dan Pensiun Lingkup Setda Prov. Sulbar	Jumlah Dokumen Administrasi KGB, KP dan Pensiun	100	100	Biro Ortala
8	Program Penguatan Organisasi				
8.1	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten	100	100	Biro Ortala

	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	dan Provinsi Sulawesi Barat			
8.2	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi	100	100	Biro Ortala
8.3	Sosialisasi perundang undangan tentang organisasi perangkat daerah	Jumah Peserta Sosialisasi	100	100	Biro Ortala
8.4	Pendampingan tentang Tata Cara Penyusunan Budaya Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Peserta	100	100	Biro Ortala
<b>6</b>	<b>Biro Umum</b>				
6.1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>99,74</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar yang Dikelola	5300	4865	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	Jumlah Rekening yang Terbayarkan Selama Satu Tahun	4	4	

	dan listrik				
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang yang Dicitak	15	15	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman ( kue, nasi dos, dan Prasmanan ) yang disediakan	36	36	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dan dilaksanakan di Luar Daerah	220	220	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dan dilaksanakan di Dalam Daerah	100	100	
	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan	25	26	
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pegawai	Jumlah Data/Informasi Kepegawaian	70	70	

	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Sekretariat Daerah	Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Perjalanan Dinas	330	330	
	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Gubernur	Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Perjalanan Dinas	420	420	
	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Wakil Gubernur	Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Perjalanan Dinas	210	210	
	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Asisten Sekretaris Daerah	Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Perjalanan Dinas	270	270	
	Pengelolaan Administrasi Tata Usaha Para Staf Ahli Gubernur	Jumlah Urusan Ketatausahaan, Administrasi dan Perjalanan Dinas	270	270	
	Penyediaan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah Rumah Tangga Pimpinan yang Dikelola dengan Baik	3	3	

	Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Sekretariat	150	150	
	Penataan Kearsipan Lingkup Biro Umum dan Perlengkapan	Jumlah Tenaga Kearsipan yang Handal	20	20	
6.2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang Diadakan	5	5	
	Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan yang Diadakan	10	10	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Diadakan	4	4	
	Pengadaan	Jumlah Pengadaan Peralatan Kerja Di Kantor	10	10	

	peralatan gedung kantor				
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang Terpeliharanya dengan Baik	3	3	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dengan Baik	4	4	
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Terpelihara dengan Baik	17	17	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara dengan Baik	164	164	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	35	35	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang Terpelihara	35	35	



	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung VIP Room Bandara	Jumlah Gedung VIP Room Bandara yang Terpelihara	1	1	
	Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi	9	9	
	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Direhabilitasi	100	100	
6.3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Sumberdaya Aparatur yang Memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	19	19	
6.4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</b>	<b>Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>97,50</b>	

	<b>dan Keuangan</b>				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	6	6	
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semester Sekretariat Daerah	2	2	
	Penyusunan laporan keuangan triwulanan	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan Sekretariat Daerah	4	4	
	Pengelolaan Gudang dan Pendistribusian Barang	Jumlah Pengelolaan Gedung dan Pendistribusian Barang yang Efektif	25	25	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Program	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi	6	6	
	Penyusunan	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang dan Jasa	1	1	

	Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa Lingkup Biro Umum dan Perlengkapan				
	Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara Sekretariat	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekretariat Daerah	12	12	
	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan	12	12	
	Pengelolaan Pertanggungjawaban Bendahara KDH dan WKDH	Jumlah Laporan Pertanggung Jawaban KDH dan WKDH	12	12	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Keuangan Sekretariat Daerah	12	12	
	Monitoring Penggunaan Barang dan	Jumlah Titik Pelaksanaan Monitoring	28	28	

	Pemanfaatan Barang				
	Penyusunan HPS dan Pengadministrasian Dokumen Proses Pengadaan	Jumlah Dokumen Proses Pengadaan	80	50	
	Penatausahaan PPK SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan PPK SKPD	1	1	
	Konsolidasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah Laporan Konsolidasi Sekretariat yang Tercapai	12	12	
	Elektronisasi Pencatatan dan Pendataan Barang	Jumlah Pencatatan dan Pendataan Barang Secara Elektronik	25	25	
6.5	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil</b>	<b>Persentase layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dan pemerintah provinsi sulawesi barat di dalam dan luar daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

	<b>Kepala Daerah</b>				
	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat	250	250	
	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Jumlah Kegiatan Koordinasi Unsur Muspida	95	95	
	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43	43	
	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	85	85	
	Pelayanan Kedinasan Protokoler	Jumlah Kegiatan Keprotokolan yang Berjalan dengan Baik	150	150	

Pelaksanaan dan tugas fungsi Sekretariat Daerah tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan pelayanan kepada unsur pimpinan, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Permasalahan umum

Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral dan mengamanatkan dibentuknya organisasi perangkat daerah, serta berdasarkan hasil kajian dan evaluasi, terdapat beberapa satuan kerja perangkat daerah termasuk Sekretariat Daerah yang dianggap mendesak untuk dilakukan penataan kembali susunan organisasinya berdasarkan tingkat kebutuhan, karakteristik, kemampuan anggaran dan SDM aparatur, beban kerja. Secara garis besar dapat dipetakan permasalahan kelembagaan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

a. Overload

Overload yang terjadi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat disebabkan oleh ketidaksesuaian antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya aparatur, yang ada pada setiap Biro.

b. Overlapping Internal

Permasalahan overlapping internal terjadi karena kurangnya komunikasi kerja baik secara vertikal maupun horizontal, dan kekurangmampuan pejabat tertentu dalam menyelesaikan permasalahan/tugas, yang menjadi tugas dan fungsinya, sehingga pimpinan memberikan tugas tersebut kepada pejabat lain yang dianggap mampu meskipun bukan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini akan menimbulkan permasalahan, tatkala tugas yang diberikan oleh pimpinan tersebut bersentuhan dengan penganggaran dan tanggung jawab sebagai pemegang jabatan tersebut.

c. Overlapping Eksternal

Overlapping eksternal disebabkan oleh tidak spesifiknya tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, LTD, dan biro. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan yang sifatnya makro dan perumusan kebijakan teknis menjadi tidak jelas.

d. Anggaran

Kurang seimbang antara beban tugas dan alokasi anggaran, serta dukungan sarana dan prasarana penunjang menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menyebabkan menurunnya kinerja.

2. Analisa Permasalahan dan Formulasi kebijakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Untuk Optimalisasi fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Sekretaris Daerah, oleh karena itu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Asisten Bidang Pemerintahan

Membawahi

- a. Biro Tata Pemerintahan
- b. Biro Hukum

2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Membawahi

- a. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- b. Biro Kesejahteraan Rakyat

3. Asisten Bidang Administrasi Umum

Membawahi

- a. Biro Organisasi dan Tatalaksana
- b. Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol

a. Biro Tata Pemerintahan

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 dikategorikan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang rata-rata mencapai target yang telah ditentukan. Namun Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. adapun permasalahannya ialah :

- ❖ faktor internal : Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, disebabkan kurangnya Koordinasi dan Perencanaan yang masih perlu diperbaiki sehingga waktu sangat sempit untuk merealisasikan kegiatan seratus persen;
- ❖ Faktor Eksternal : hadirnya virus covid-19 di Indonesia yang mengharuskan refocusing anggaran dan pembatasan dalam melaksanakan aktifitas yang dapat melanggar protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19.

b. Biro Hukum

Pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Biro Hukum. Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian



besar kegiatan Biro Hukum telah mencerminkan kinerja yang berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah dengan Biro Hukum dalam mempersiapkan kajian akademik/naskah akademik dari Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan, penyesuaian jadwal pembahasan dengan Legislatif;
- Kurang sinkronnya proses perencanaan dengan proses pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 pada Biro Perekonomian dan Administrasi Perekonomian telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Biro Hukum. Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian besar telah berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Kurangnya koordinasi antara perangkat daerah dengan Biro Perekonomian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti: Penyusunan Dokumen Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran Pembangunan Daerah;

- Kondisi Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi capaian kinerja Biro Perekonomian dalam mengendalikan nilai inflasi daerah Provinsi Sulawesi Barat maupun peningkatan kualitas BUMD dan BLUD yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sehingga target pengendalian kebijakan perekonomian kurang optimal, dimana kondisi tersebut dirasakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia.
- Kualitas kecepatan jaringan internet di wilayah Sulawesi Barat merupakan masalah yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang berbasis elektronik (*e-procurement*)
- Kurang sinkronnya proses perencanaan dengan proses pelaksanaan program dan kegiatan.

d. Biro Kesejahteraan Rakyat

Secara umum pelaksanaan program kegiatan yang ada di biro kesejahteraan rakyat sudah sesuai dengan target yang ditentukan didalam RPJMD dan RENSTRA namun tetap kami menyadari masih ada beberapa hal ingin diperbaiki mulai dari perencanaan sampai pada tahapan teknis pelaksanaan kegiatan tersebut agar lebih tepat sasaran. Adapun masalah yang ada ialah perbaikan SOP pada setiap kegiatan terutama pada bantuan rumah ibadah.

e. Biro Organisasi dan Tatalaksana

Sebagian OPD menganggap Biro Organisasi dan Tatalaksana kurang berperan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, sehingga Biro Organisasi menjadi salah satu instansi pemerintah daerah yang termarginalkan yang berimbas pada penganggaran. Namun sesungguhnya fungsi dan peran Biro Organisasi dan Tatalaksana sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi dimana Biro Organisasi dan Tatalaksana

melakukan kajian analisis jabatan, penataan kelembagaan, dan penataan ketatalaksanaan terhadap susunan organisasi dan tata kerja OPD. Baik atau buruk hasil kajian tersebut akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Organisasi selain memberikan pelayanan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, juga memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu pelaksanaan fasilitasi dan klarifikasi raperda organisasi perangkat daerah

f. Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum yang berorientasi pada pelayanan administrasi umum, administrasi pimpinan dan pelayanan rumah tangga, dalam pelaksanaan tanggungjawab tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2020 yaitu :

➤ Masalah Internal

- Masih belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana penunjang operasional kantor sehingga menyebabkan pelayanan fasilitasi acara dan kerumahtanggaan tidak maksimal
- Belum diterapkannya sistem administrasi terintegrasi sehingga menyebabkan pelayanan administrasi umum dan administrasi pimpinan kurang efektif

➤ Masalah Eksternal

- Adanya penyebaran wabah covid-19 mengakibatkan munculnya kebijakan baru dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan membuat pelaksanaan fisik kegiatan terbatas serta dari segi keuangan dalam menanggulangi dampak penyebaran covid-19 Biro Umum mengalami Refocusing anggaran sebesar 50%.

- Kurangnya kesadaran instansi lain dalam menjalankan administrasi persuratan sesuai SOP terutama dalam hal surat menyurat.

### 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

#### a. Tantangan

Tantangan merupakan gambaran kondisi yang dapat dilihat berasal dari eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk tantangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Percepatan reformasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat nomor 32 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan;
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;
4. Lemahnya tingkat kesadaran stakeholder dan masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
5. Lemahnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
6. Berbagai kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah;
7. Kurangnya koordinasi dan integrasi dari organisasi perangkat daerah lain terkait kebijakan strategis;
8. Keterbatasan sumberdaya aparatur yang kompeten dibidangnya meskipun dilihat dari strata pendidikan sebagian besar berpendidikan di atas SLTA.

#### b. Peluang

Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun peluang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Seiring dengan lahirnya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka diperlukan upaya penataan kelembagaan

- perangkat daerah. Sesuai kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan baik anggaran maupun sumber daya aparatur;
2. Situasi dan kondisi, keamanan dan ketertiban baik skala nasional maupun lokal;
  3. Peraturan perundang-undangan tentang reformasi birokrasi dan percepatan pemberantasan KKN, serta adanya komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN;
  4. Tuntutan kebutuhan adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam upaya mewujudkan good governance, penetapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan upaya pencegahan KKN;
  5. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya aparatur Sekretariat Daerah.

#### 2.4. Formulasi Isu-isu Penting

Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaah dari komponen komponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari analisis SWOT serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 5 (lima) isu strategis permasalahan adalah :

##### 1. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perizinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban)

## 2. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

## 3. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakikatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

#### 4. Restrukturisasi organisasi dan manajemen publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (Institutional re-engineering) yang „ramping struktur, kaya fungsi”. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum

sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

#### 5. Manajemen keuangan dan aset daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah**

Visi dan Misi

RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Sulawesi Barat.

Visi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022

**“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

**Misi Pertama**

Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya. yaitu Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

**Misi Kedua**

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya. yaitu kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan

luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

### **Misi Ketiga**

Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis. yaitu Penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

### **Misi Keempat**

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi. yaitu Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan "teknologi" produksi itu sendiri. Harrod – Domar mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap atau steady growth dalam jangka panjang pada semua variabel seperti output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh adanya inovasi dari para pelaku ekonomi, inovasi ini berarti adanya perbaikan dalam arti luas. Misalnya adanya penemuan produk baru ataupun penemuan pasar baru.

### **Misi Kelima**

Mengarusutamakan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan. yaitu kesatuan dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran
I	Biro Tata Pemerintahan	
1	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Daerah
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Tersusun	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Tersusun
3	Meningkatkan Pemenuhan Fasilitas Penataan dan Pengembangan Daerah Otonom dan Daerah Otonom Baru	Meningkatnya Pemenuhan Fasilitas Penataan dan Pengembangan Daerah Otonom dan Daerah Otonom Baru
4	Meningkatkan Jumlah Kabupaten yang Dibina dalam Peningkatan Kualitas DOB	Meningkatnya Jumlah Kabupaten yang Dibina dalam Peningkatan Kualitas DOB
5	Meningkatkan Cakupan Data Pembinaan Wilayah Prov. Sulbar	Terwujudnya Cakupan Data Pembinaan Wilayah Prov. Sulbar
6	Meningkatkan Jumlah Data Penamaan Rupabumi dan Unsur Buatan	Meningkatnya Jumlah Data Penamaan Rupabumi dan Unsur Buatan
7	Meningkatkan Pemenuhan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

	Pemerintah kabupaten	Pemerintah kabupaten
9	Meningkatkan Fasilitas Pengelolaan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
10	Melaksanakan Perjanjian Kerjasama	Terlaksananya Perjanjian Kerjasama
11	Melaksanakan Kerjasama Provinsi yang Terkelola Melalui Aliansi Strategis Multi Pihak Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Kerjasama Provinsi yang Terkelola Melalui Aliansi Strategis Multi Pihak Dalam dan Luar Negeri
12	Menyelesaikan Rancangan Produk Kerjasama Pemerintah Daerah	Terselesaikannya Produk Kerjasama Pemerintah Daerah
13	Menyelesaikan administrasi Batas antar Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat	adanya Permendagri Batas antar Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat
14	Menyelesaikan administrasi Batas antar Provinsi Sulawesi Barat	Terbitnya permendagri Batas wilayah antar Provinsi Sulawesi Barat
15	Meningkatkan Pemenuhan Fasilitas Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Persentase Pemenuhan Fasilitas Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
16	Melaksanakan Pemantuan Pemilihan Kada/Leg/Pres	Terlaksananya Pemantuan Pemilihan Kada/Leg/Pres
17	Melaksanakan Fasilitas Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terfasilitasinya administrasi pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
18	Meningkatkan Fasilitas Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Prov/Kab/Kota	Meningkatnya Fasilitas Administrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Prov/Kab/Kota
19	Pembangunan Pilar Batas Utama dalam wilayah dan luar wilayah	adanya Pembangunan Pilar Batas Utama dalam wilayah dan luar

	Provinsi Sulawesi Barat.	wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
	Meningkatkan Persentase Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama	Meningkatnya Persentase Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama
	meningkatkan Koordinas	
II	Biro Hukum	
1	Meningkatkan pelayanan penanganan perkara	Terlaksananya pelayanan penanganan perkara
2	Meningkatkan Pelayanan dan Informasi terhadap permasalahan HAM	Terlaksananya pelayanan dan informasi terhadap permasalahan HAM
3	Meningkatkan Pelayanan terhadap tindak lanjut hasil audit	Terlaksananya pelayanan tindak lanjut hasil audit
4	Meningkatkan Pelayanan informasi terhadap permasalahan HAM	Terlaksananya pelayanan informasi terhadap permasalahan HAM
5	Meningkatkan Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
6	Meningkatkan Jumlah Jejaring Pemberi Layanan dan Akses terhadap Produk Hukum Daerah	Meningkatnya Jumlah Jejaring Pemberi Layanan dan Akses terhadap Produk Hukum Daerah
7	Meningkatkan Persentase Penyampaian Dokumen Laporan Penatausahaan yang Dihasilkan	Meningkatnya persentase Penyampaian Dokumen Laporan Penatausahaan yang Dihasilkan
III	Biro Ekbang	
1	Meningkatkan Penyerapan Anggaran dan Analisis Sarana dan Prasarana Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Penyerapan Anggaran dan Analisis Sarana dan Prasarana Pembangunan
2	Meningkatkan Perekonomian dan	Terfasilitasinya Kegiatan

	Pengendalian Inflasi Daerah	Pembinaan Perekonomian dan Pengendalian Inflasi Daerah
3	Meningkatkan Penggunaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai prosedur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Penggunaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai Prosedur
IV	Biro Kesra	
1	Meningkatkan Persentase Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama	Meningkatnya Persentase Pelayanan dan Kualitas Kehidupan Beragama
2	Meningkatkan Persentase Kualitas Kehidupan Beragama	Meningkatnya Persentase Kualitas Kehidupan Beragama
3	Meningkatkan Persentase Kualitas Hidup dan Kesejahteraan	Meningkatnya Persentase Kualitas Hidup dan Kesejahteraan
V	Biro Organisasi	
1	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik
2	Meningkatkan Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Meningkatnya Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti
3	Meningkatkan Nilai Predikat SAKIP	Meningkatnya Nilai Predikat SAKIP
4	Meningkatkan Persentase OPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Meningkatnya Persentase OPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
5	Meningkatkan penyusunan SOP Sesuai Tupoksi	Meningkatnya penyusunan SOP Sesuai Tupoksi
6	Meningkatkan Indeks RB	Meningkatnya Indeks RB
7	Meningkatkan Persentase Aparatur yang Menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensinya	Meningkatnya Persentase Aparatur yang Menduduki Jabatan Sesuai Dengan Kompetensinya

8	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kelembagaan
9	Meningkatkan Persentase Pembinaan Dalam Pengembangan ASN	Meningkatnya Persentase Pembinaan Dalam Pengembangan ASN
VI	Biro Umum	
1	Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2	Meningkatkan Percepatan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tingkat Percepatan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
4	Meningkatkan Layanan Penyediaan Informasi	Meningkatnya Layanan Penyediaan Informasi

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**

Program disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Lampiran I tentang matrik pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Sub. Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan perundang undangan.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**A. Biro Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan</b>	<b>Pagu</b>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>3,201,440,000</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>324,200,000</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.400.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.320.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.230.000



1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.500.000
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.500.000
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.900.000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.350.000
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>87,550,000</b>
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.900.000
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	78.650.000
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>507,070,000</b>
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	239.680.000
3.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.800.000
3.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.790.000
3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.800.000
<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,289,450,000</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	93.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	150.650.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	796.800.000

<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>611,320,000</b>
5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	476.000.000
5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.970.000
5.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.350.000
<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>381,850,000</b>
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.400.000
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.650.000
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.800.000
<b>II</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>15,713,425,000</b>
<b>1.</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>9,081,465,000</b>
1.1	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1.475.870.000
1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	2.400.225.000
1.3	Fasilitasi Penataan Wilayah	5.205.370.000
<b>2.</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>3,951,780,000</b>
2.1	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1.799.450.000

2.2	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	300.430.000
2.3	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.851.900.000
<b>3.</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>2,680,180,000</b>
3.1	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1.680.910.000
3.2	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	545.630.000
3.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	453.640.000
<b>III</b>	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>81,163,905,000</b>
<b>1.</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>	<b>77,845,025,000</b>
1.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	57.824.250.000
1.2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	20.020.775.000
<b>2.</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>1,778,190,000</b>
2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	564.000.000
2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	437.650.000
2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	776.540.000
<b>3.</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>1,540,690,000</b>
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	453.780.000
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan	543.260.000

	Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	543.650.000

## B. Biro Hukum

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>3,897,100,000</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>300.000.000</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000

<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>210.000.000</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.000.000
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.000.000
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000
2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
3.2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
3.3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>690.000.000</b>

	<b>Perangkat Daerah</b>	
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.000.000
4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	115.000.000
4.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000
4.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000
4.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000
4.6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	190.000.000
4.7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000
4.8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>750.000.000</b>
5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000
5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000
5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000
5.5	Penyediaan Bahan/Material	150.000.000
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000

5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.210.000.000</b>
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	400.000.000
6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000
6.3	Pengadaan Mebel	200.000.000
6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.000.000
6.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000
6.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.000.000
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>111.000.000</b>
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	111.000.000
<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>576.100.000</b>
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	140.000.000
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000

8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.100.000
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.000.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>3.595.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>	<b>2.410.000.000</b>
1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	950.000.000
1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	460.000.000
1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	350.000.000
1.4	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	650.000.000
<b>2</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>1.185.000.000</b>
2.1	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	885.000.000
2.2	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	300.000.000

C. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
----	------------------------------------	------



<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>3.940.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>900.000.000</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000.000
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000.000
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.000.000
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100.000.000
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	250.000.000
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000
<b>2.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>200.000.000</b>
2.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000
2.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000
<b>3.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>650.000.000</b>
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	250.000.000
3.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000
3.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000

<b>4.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.540.000.000</b>
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130.000.000
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.000.000
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	180.000.000
4.5	Penyediaan Bahan/Material	260.000.000
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000
4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>250.000.000</b>
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000
<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>400.000.000</b>
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>4.500.000.000</b>

<b>7.</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>2.200.000.000</b>
7.1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	1.100.000.000
7.2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1.100.000.000
<b>8.</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>	<b>800.000.000</b>
8.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	200.000.000
8.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	200.000.000
8.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	400.000.000
<b>9.</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>1.500.000.000</b>
9.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	300.000.000
9.2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	300.000.000
9.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	300.000.000
9.4	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	300.000.000
9.5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	300.000.000
	<b>PROGRAM KEBIJAKAN</b>	<b>1.150.000.000</b>

	<b>ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	
<b>10.</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>550.000.000</b>
10.1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	150.000.000
10.2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	200.000.000
10.3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	200.000.000
<b>11.</b>	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>600.000.000</b>
11.1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	200.000.000
11.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	200.000.000
11.3	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	200.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.590.000.000</b>

D. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>1.535.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat Kinerja Daerah</b>	<b>200.000.000</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000

1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>200.000.000</b>
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100.000.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>875.000.000</b>
3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000
3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000
3.3	Penyediaan Bahan/Material	125.000.000
3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>160.000.000</b>
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160.000.000
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.000.000</b>
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000
<b>II</b>	<b>Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>3.260.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>860.000.000</b>
1.1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000

1.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	360.000.000
1.3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>750.000.000</b>
2.1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	250.000.000
2.2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000
2.3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000
<b>3</b>	<b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.650.000.000</b>
3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	450.000.000
3.2	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	400.000.000
3.3	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	800.000.000
	<b>J U M L A H</b>	<b>4.795.000.000</b>

E. Biro Organisasi

No	Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan	Pagu
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>2.080.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Perangkat Kinerja Daerah</b>	<b>150.000.000</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000

1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
<b>2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>250.000.000</b>
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000
2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.070.000.000</b>
3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
3.5	Penyediaan Bahan/Material	70.000.000
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	650.000.000
3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>110.000.000</b>
4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000
4.2	Pengadaan Mebel	100.000.000
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>110.000.000</b>
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000

<b>II</b>	<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>3.200.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>1.200.000.000</b>
1.1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	600.000.000
1.2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	300.000.000
1.3	Penataan Analisis Jabatan	300.000.000
<b>2</b>	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>2.000.000.000</b>
2.1	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	700.000.000
2.2	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	250.000.000
2.3	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	100.000.000
2.4	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	700.000.000
2.5	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	250.000.000
	<b>J U M L A H</b>	<b>5.280.000.000</b>

F. Biro Umum

<b>No</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan</b>	<b>Pagu</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>28.535.287.560.099</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>725.150.388</b>
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	324.336.624
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	57.481.656



1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	57.489.216
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	42.443.136
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	42.443.136
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	128.223.480
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.733.140
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>30.248.143.630,80</b>
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.433.811.778,80
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	252.352.716
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.023.776.364
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	214.676.400
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.346.748
2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	123.332.736

2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	83.575.872
2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	70.271.016
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.713.496.278</b>
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	620.686.782
3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.681.529.648
3.3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	639.671.616
3.4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	115.335.072
3.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	93.363.240
3.6	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	562.909.920
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.286.753.472</b>
4.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200.000.000
4.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	613.505.952
4.3	Pendataan dan	243.786.720

	Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
4.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	111.066.240
4.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.056.960
4.6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000
4.7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	875.337.600
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>16.889.178.708</b>
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.391.594.304
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.327.152
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	547.165.776
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.466.629.124
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	578.535.960
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	350.000.000
5.7	Penyediaan Bahan/Material	500.000.000
5.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.183.375.032
5.9	Penyelenggaraan Rapat	1.553.431.632

	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
5.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	83.119.728
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>14.235.363.244</b>
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.000.000
6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.288.816.000
6.3	Pengadaan Alat Besar	900.000.000
6.4	Pengadaan Mebel	600.000.000
6.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000
6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.047.486.076
6.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.899.061.168
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.514.904.348</b>
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	583.625.460
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.783.442.888
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000

7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.647.836.000
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.085.851.136</b>
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.399.272.296
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.791.084.656
8.3	Pemeliharaan Mebel	400.000.000
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.261.958.184
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.233.536.000
8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000
<b>9</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.963.446.608</b>
9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	285.781.432
9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	400.000.000

	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
9.3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	77.665.176
9.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.200.000.000
<b>10</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>	<b>21.349.521.924</b>
10.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	7.212.700.992
10.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	5.352.441.840
10.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	8.784.379.092
<b>11</b>	<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>13.904.316.501</b>
11.1	Penyiapan Materi Pimpinan	2.799.573.974
11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10.255.565.167
11.3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	849.177.360
<b>12</b>	<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>	<b>2.993.466.972</b>
12.1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	438.153.444
12.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.032.055.032

12.3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	1.523.258.496
	<b>JUMLAH</b>	<b>129.909.593.210</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kaidah Pelaksanaan**

Untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat diupayakan secara optimal untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022 yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022.
2. Selanjutnya Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk segera menyusun RKA dan DPA tahun 2022 dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara berkala melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap Rencana Kerja tersebut baik triwulan maupun semesteran.
4. Agar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk selalu berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kab/Kota maupun Pemerintah Pusat.

#### **4.2 Penutup**

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 ini, memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran dan evaluasi kerja tahun sebelumnya. Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.



Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan dapat dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Berhasil atau tidaknya suatu Rencana Kerja bukan hanya pada perumusannya saja akan tetapi pada saat diimplementasikan oleh seluruh elemen Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

**Dr. MUHAMMAD IDRIS, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama  
Nip. 19640015 199303 1 001